



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

bkkbn 



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	10
1.4 Landasan Hukum .....	12
1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana .....	13
1.5 Sistematika.....	17

<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja .....	26

<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>28</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	29
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	31
3.3 Realisasi Anggaran .....	56

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Rekomendasi .....	63

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja  
RKT / Lain2 yang dianggap perlu

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan Non PNS sesuai Golongan Tahun 2022.....	9
Tabel 1.2 Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	9
Tabel 1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	24
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	27
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	31
Tabel 3.2 Analisis Realisasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja .....	34
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD .....	39
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Standar Nasional/Provinsi .....	40
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja...	42
Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2022.....	46
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan .....	49
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.....	8
---	---

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

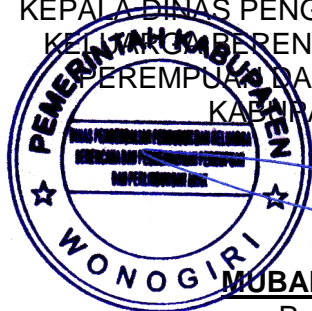
Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI



**MUBAROK, SKM, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19690212 199003 1 010



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri selaku unsur pembantu pimpinan, didorong untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kab/Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri No. 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :



Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas,dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.





Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Mubarak, SKM, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

#### **a. Sekretariat**

Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas.

Fungsi : (a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas; (c) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana Dinas; (d) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas; (f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas; (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian, yaitu:

**a.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penata usahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas.



**a.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

### **b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanan; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , terdiri dari kelompok jabatan Fungsional yang terdiri 2 (dua) sub koordinator yaitu:

#### **b.1 Sub koordinator Pengendalian Penduduk**

#### **b.2 Sub koordinator Keluarga Berencana**

Sub koordinator tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



### **c. Bidang Keluarga Sejahtera**

Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga Sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 2 (dua) sub koordinator yaitu:

#### **c.1 Sub koordinator Bina Ketahanan Keluarga,**

#### **c.2 Sub koordinator Pemberdayaan Keluarga.**

Sub koordinator tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

### **d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang



pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

(d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu :

**d.1 Sub koordinator Pemberdayaan Perempuan,.**

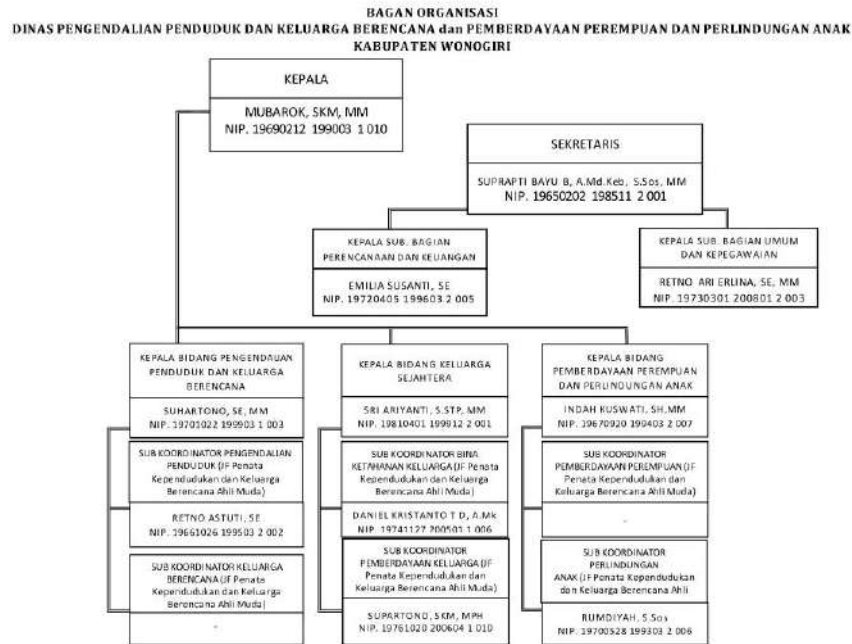
**d.2 Sub koordinator Perlindungan Anak .**

Sub koordinator tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 Sub koordinator. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 109 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri**



Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) orang PNS dan 46 (empat puluh enam) orang Pegawai Non PNS termasuk tenaga lapangan. Jika dilihat dari komposisi golongan, Golongan IV/b sebesar 3,17% atau 2 orang, Golongan IV/a sebesar 6,34% atau 4 orang, Golongan III/d sebesar 6,34% atau 4 orang, Golongan III/c sebesar 1,58% atau 1 orang, Golongan III/b sebesar 4,76% atau 3 orang, Golongan III/a sebesar 1,58% atau 1 orang, Golongan II/d sebesar 1,58% atau 1 orang, Golongan II/c sebesar 1,58% atau 1 orang, sedangkan untuk pegawai Non PNS sebesar 73,15 % atau 46 orang.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan Non PNS sesuai Golongan Tahun 2022**

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV/b	2	3,17
2.	IV/a	4	6,34
3.	III/d	4	6,34
4.	III/c	1	1,58
5.	III/b	3	4,76
6.	III/a	1	1,58
7.	II/d	1	1,58
8.	II/c	1	1,58
9.	Non PNS	46	73,15
		63	

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 11,1% atau 7 orang berpendidikan S2, kemudian 49,2% atau 31 orang berpendidikan S1, sebanyak 7 orang atau 11,1% berpendidikan D3 dan 28,5% atau 18 orang berpendidikan SMA.

**Tabel 1.2**  
**Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	S2	7	11,1
2.	S1	31	49,2
3.	D3	7	11,1
3.	SMA	18	28,5
		63	



### **1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

#### **A. Aspek strategis**

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, maka penting pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak, hal ini dikarenakan masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.



## B. Permasalahan Utama

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Perlindungan perempuan dan Anak yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemenuhan cakupan Perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan
- c. Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemahaman korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk berani melapor.
- b. Meningkatkan pengembangan lembaga penyedia pelayanan kualitas keluarga.
- c. Meningkatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak bagi Keluarga.
- d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak yang optimal.
- e. Advokasi kebijakan dan peningkatan pendampingan pemenuhan hak anak pada lintas sektor.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.
- b. Masih rendahnya Rasio Akseptor KB.
- c. Masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Komunikasi , Informasi dan Edukasi terhadap program Bangga Kencana;





- b. Meningkatkan Kopetensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja.
- c. Meningkatkan kesertaan KB Pria;
- d. Meningkatkan pengendalian Pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Peningkatan sarana penunjang pelayanan KB
- f. Peningkatan pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- g. Peningkatan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- h. Peningkatan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### 1.4 Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

## 1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana**

<b>NO</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
1	Portable Generating Set	1	Unit
2	Portable Water Pump	1	Unit
3	Kendaraan Mobil Unit Penerangan	2	Unit
4	Kendaraan Unit Pelayanan	1	Unit
5	Kendaraan Unit Pelayanan Akseptor	2	Unit
6	Kendaraan Unit PPPA	1	Unit
7	Kendaraan Angkutan Barang	1	Unit
8	Kendaraan Operasional	2	Unit
9	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Operasional PKB	95	Unit
10	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Operasional PPPA	2	Unit
11	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Anti Stunting	2	Unit
12	Troli	1	Unit
13	Mesin Ketik	1	Unit
14	Lemari Besi/Metal	1	Buah
15	Lemari kayu	36	Buah



16	Rak Besi	9	Buah
17	Rak Kayu	42	Buah
18	filling Cabinet	6	Buah
19	Kardek Kayu	1	Buah
20	Lemari Kaca	49	Buah
21	Papan Visual/Baliho	55	Buah
22	Banner Kegiatan	3	Buah
23	Rak data dan Papan Data	1	Paket
24	Papan Nama	29	Buah
25	White Board	29	Buah
26	Penghancur Kertas	1	Buah
27	LCD Proyektor	6	Unit
28	Meja Kerja Kayu	110	Buah
29	Kursi Besi Metal/Kursi Kerja	73	Unit
30	Sice	5	Set/paket
31	Kursi Panjang Besi/Metal	2	Buah
32	Meja Rapat	100	Buah
33	Tempat tidu kayu	1	Buah
34	Meja Resepsionis	2	Set/paket
35	Meja Bundar	10	Buah
36	Meja 1/2 Biro	45	Buah
37	Kursi Rapat	1.046	Buah
38	Kursi Tamu	1	Set
39	Kursi Putar	8	Buah
40	Lemari pakaian	1	Buah
41	Gorden	8	Set/paket
42	Taplak Meja Prasmanan	2	Set/paket
43	Taplak Meja bundar	10	Buah
44	Backdroup Pertemuan	1	Set/paket
45	Taplak meja Khusus	1	Buah
46	Pallet Lantai	10	Buah
47	Vacum Cleaner	1	Buah
48	AC Split	21	Unit
49	Kipas Angin	105	Buah
50	Exhause Fan	14	Buah
51	Kompor Gas	2	Buah
52	Alat Dapur	1	Buah
53	Televisi	2	Buah



54	Cassete Recorder	35	Buah
55	Sound System	1	Unit
56	Wireless (TOA)	27	Unit
57	Unit Power Supply (UPS)	2	Unit
58	Camera Video	1	Buah
59	Taplak Meja & Sarung Kursi	5	Set
60	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah
61	Tiang Bendera	2	Buah
62	Tangga Aluminium	1	Buah
63	Mimbar/Podium	2	Buah
64	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain (GZ 63 AMR)	1	Buah
65	Tape Mini Compo LG	2	Buah
66	Deep Soup Bowl	2	Buah
67	Alat Pemadam/Portable	1	Set
68	Hidran Kebakaran	1	Set
69	Meja Kerja Pejabat	13	Buah
70	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Buah
71	Meja Tamu Biasa	1	Buah
72	Kursi Kerja Pejabat	22	Buah
73	Lemari Buku Arsip	23	Buah
74	Audio Amplifier	1	Buah
75	Microphone/Wireless MIC	3	Set
76	Camera + Attachmen	1	Buah
77	LCD Proyektor BenQ MW550	37	Unit
78	Microphone Table Stand	1	Buah
79	CCTV	4	Buah
80	Pointer	2	Buah
81	Meja Projector	2	Buah
82	Camera Electronic (SLR)	1	Buah
83	Layar LCD	2	Buah
84	Camera Digital	2	Buah
85	Pesawat Telephone	1	Buah
86	Tablet Samsung	53	Unit
87	Faxsimile	1	Unit
88	Loudspeker	4	Buah
89	Tensimeter	4	Buah
90	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah



91	Lemari Obat (Kaca)	25	Buah
92	Service Model Kit (Sterilisator uap)	3	Set
93	Service Model Kit (IUD Kit)	12	Set
94	Service Model Kit (Gynbed)	12	Set
95	Service Model Kit (Implant Kit)	25	Set
96	Service Model Kit (KIE Kit)	9	Set
97	Service Model Kit (Minilap Kit)	1	Set
98	Service Model Kit (APE)	6	Set
99	Service Model Kit (Genre Kit)	6	Set
100	Service Model Kit (KIE Kit)	25	Set
101	Gynecological Examining Table (Obgynbed)	42	Set
102	Minilaparatomy Instrument Set	1	Set
103	Genre Kit	4	Set
104	KIE Kit (APE Tumbuh Kembang Anak)	2	Set
105	Alat Peraga Edukatif (APE)	10	Set
106	P.C Unit	57	Unit
107	Lap Top	68	Unit
108	Printer (Peralatan Personal Komputer)	76	Unit
109	Modem Blazz	2	Buah
110	BKB KIT	33	Paket
111	BKB Kit Anti Stunting	10	Paket
112	Kit Siap Nikah Anti Stunting	10	Paket
113	Kit Siap Nikah	40	Paket
114	BKB Kit Cegah Stunting	33	Paket



## 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah:

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Keadaan Sarana Dan Prasarana, Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

### BAB IV PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi.

### LAMPIRAN



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan /



kebijakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021 - 2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional bagi visi dan misi dan Program Bupati guna menentukan pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penunjang Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga





Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 merupakan keberlanjutan dari implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode 2021 – 2026. Capaian selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintah konkuren, unsur pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting dalam penetapan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 -2026 yaitu :

“ Mewujudkan Wonogiri yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “  
dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan tersebut adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Terhadap Visi jangka menengah Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## **2. Misi**

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. Menjadikan rakyat wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
- b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

## **3. Tujuan dan Sasaran.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Agar Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 meliputi 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

Empat Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya
2. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan pengembangan wilayah.

Sebelas Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
4. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
5. Terwujudnya birokrasi yang kapabel
6. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
7. Meningkatnya pertumbuhan investasi, Menurunnya kemiskinan, Menurunnya pengangguran
8. Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas



9. Meningkatnya akses air baku
10. Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup
11. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, memonitor dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran penting mendukung pencapaian Visi dan seluruh Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terutama pada Misi 1 yaitu Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Mendukung Tujuan 1 : yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Serta mendukung sasaran ke 3 : Yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, sebagaimana telah ditetapkan tujuan, sasaran, Indikator kinerja dan target sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100
		1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	100
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Madya	Madya	Nidya	Nindya	Utama
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	-	-	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,27	0,265	0,260	0,255	0,250	0,245
		2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	77,50	78,32	78,85	79,00	79,20	79,20
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	9,43	8,47	8,12	7,59	7,44	7,44
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	-	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43	43	44	45	45	46
		3.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50
				Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	2	3	4	5
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	85	85	85	85	85



			Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	0	0	1	1	1	1
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	65	70	75	80	80,5	85,5

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah tertuang dalam Renstra tahun 2021 – 2026.

Adapun penetapan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2022
1	2	3		4	5	7
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100
		1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	-	-	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,265
		2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	78,32
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	8,47



3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	-	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43
		3.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50
				Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85
				Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2
				Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian



Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa kali perubahan kinerja dikarenakan adanya pergantian pejabat dan perubahan anggaran. Uraian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100%
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
3	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,265%
4	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	78,32%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8,47%
5	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	43 Angka
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	75,50
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	1
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	2
		Indeks Profesionalitas ASN	70





### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	$\geq 91\%$	Green
2	Baik	76 – 90,99%	Light Green
3	Cukup	66 – 75,99%	Orange
4	Kurang	51 – 65,99%	Yellow
5	Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dan sebanyak 12 indikator kinerja (*outcomes*)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi



pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 32 tahun 2022.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100	100	100	Tujuan	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,265	0,092	165,28	Tujuan	Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dispendukapil Kab. Wonogiri



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43	41	95,35	Tujuan	Hasil Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Madya	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	78,32	79,16	101,07	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,47	6,82	119,48	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	76,18	100,90	Sasaran	Hasil penilaian Sakip Inspektorat Kab. Wonogiri
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	86,54	101,81	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	2	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70	69,16	98,80	Sasaran	Hasil penilaian IP ASN BKD Kab. Wonogiri

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Nilai Kematangan Organisasi , dengan capaian kinerja 95,35%, hal ini dikarenakan tidak adanya diklat aparatur sehingga pengembangan SDM



sangat kurang dan pada indikator Indeks Profesional ASN sebesar capaiannya 98,80% hal ini diklat yang diikuti belum memenuhi jam pelajaran. Sedangkan Capaian kinerja yang melebihi target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian kinerja 165,28%, indikator Rasio Akseptor KB dengan capaian kinerja 101,07%, indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) dengan capaian kinerja 119,48%, indikator Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A dengan capaian kinerja 100,90%, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 101,81%. Dan indikator Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mencapai 100% ada 5 indikator yaitu indikator Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak, indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan, indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak, indikator Jumlah Agen Perubahan dan indikator Jumlah Inovasi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Analisis Realisasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,28	0,42	50	0,27	-2,47	1114	0,265	0,092	165,28
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	43	41	95,35
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Pratama	-	n/a	Pratama	Pratama	100	Madya	Madya	100
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,65	77,02	96,70	77,50	77,40	99,87	78,32	79,16	101,07
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,50	9,91	83,41	9,43	7,89	116,33	8,47	6,82	119,48
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75,50	76,18	100,90
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	86,54	101,81
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70	69,16	98,80





Tahun 2022 adalah tahun awal pelaksanaan Renstra strategis 2021 - 2026 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Wonogiri. Sehingga pengukuran ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya karena penetapan indikator pada Renstra tahun 2021 - 2026 berbeda dengan indikator pada tahun 2016 - 2021.

Tujuan Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan, karena pada tahun sebelumnya tidak sebagai penetapan indikator. Pencapaian indikator ini sebesar 100% pada tahun 2022. Pada tujuan ini terdapat 1 Sasaran yaitu :

Meningkatnya perlindungan Perempuan dan Anak dengan 2 indikator sasaran yaitu :

- Cakupan perempuan dan anak Korban Kasus kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan . Dengan Rumus (Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu) dibagi (Jumlah Laporan/ Pengaduan yang masuk ke Unit Pelayanan Terpadu) dikali 100. Jumlah Laporan kekerasan terhadap perempuan dewasa sejumlah 14 korban dan terhadap anak sejumlah 24 korban. Total korban kekerasan perempuan dan anak sejumlah 38 korban, tertangani semua (38 korban).
- Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak.  
Pada tahun 2022 Kabupaten Wonogiri mencapai tingkatan Kabupaten Layak Anak Madya sehingga target indikator dapat terpenuhi 100%.

Tujuan Mewujudkan Pengendalian Penduduk dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi Indikator sasaran pada Renstra tahun sebelumnya. Pada tahun 2022



capaian indikator mewujudkan pengendalian penduduk 165,28% melebihi dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, lebih rendah dikarenakan pada tahun 2021 ada puncak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan angka kematian tinggi. Penghitungan indikator Laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

(Jumlah penduduk saat ini (2022) dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya (2021) dibagi jumlah penduduk saat ini (2022) dikalikan 100%.

$$(1.070.654 - 1.069.659) \text{ dibagi } 1.070.654 \times 100\% = 0,092\%$$

Dengan rumus menghitung capaian laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

2 x rencana – realisasi dibagi rencana x 100% dengan asumsi (semakin rendah realisasi semakin tinggi capaiannya)

$$(2 \times 0,265) - 0,092 \text{ dibagi } 0,265 \text{ dikalikan } 100\% = 165,28$$

(Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Kab. Wonogiri)

Pada tujuan Mewujudkan Pengendalian Penduduk terdapat satu sasaran yaitu :

Terwujudnya Pengendalian Penduduk dengan 2 indikator sasaran yaitu :

- Rasio Akseptor KB pada tahun 2022 capaian indikator ini 101,07% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikatornya 99,87% sehingga tahun 2022 capaian indikator ini lebih baik.

(Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur) dikali 100%

$$(123.997 \text{ dibagi } 156.641) \times 100\% = 79,16\%.$$



Dengan rumus perhitungan capaian (Realisasi dibagi Rencana dikali 100%)

$$79,16 \text{ dibagi } 78,32 \times 100\% = 101,07\%$$

- Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) pada tahun 2022 sebesar 119,48% lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu 116,33%

Rumus cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)

(Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Tunda (IAT) ditambah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%

$$((5.798+4.881) : 156.641) \times 100\% = 6,82\%$$

Rumus capaian :

2 x rencana - realisasi dibagi rencana x 100% dengan asumsi (Semakin rendah realisasi semakin tinggi capaiannya)

$$(2 \times 8,47) - 6,82 \text{ dibagi } 8,47 \times 100\% = 119,48\%$$

Tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang Baik indikatornya adalah Nilai Kematangan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan capaian 95,35% pada tahun 2022. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak masuk target kinerja Renstra 2016 - 2021. Sasaran yang mendukung tujuan ini adalah :

Meningkatnya Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan indikator :

- Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan



Perlindungan Anak yang pada tahun 2022 capaian kinerjanya 100,90% sehingga melebihi dari target yang ditetapkan.

- Jumlah Agen Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri .Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan bagian dari indikator sasaran Meningkatnya kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Capaian indikator ini pada tahun 2022 sebesar 101,81% melebihi dari target yang ditetapkan.
- Jumlah Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat terealisasi, capaiannya 100%.
- Indeks Profesional ASN capaian indikator ini belum mencapai target, masih di angka 98,80% dikarenakan masih perlu mendorong kegiatan – kegiatan diklat pada SDM.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

**Tabel 3.3**

**Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100	100	100	Sangat Baik



2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,092	0,245	162,44	Sudah Melebihi target RPJMD
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	41	46	89,13	Akan tercapai
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Sangat Baik
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Utama	n/a	Akan tercapai
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,16	79,20	99,95	Akan tercapai
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	6,82	7,44	108,33	Sudah Melebihi target RPJMD
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	76,18	79,50	95,82	Akan tercapai
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	5	20,00	Akan tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,54	85	101,81	Sudah Melebihi target RPJMD
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	1	200,00	Sudah Melebihi target RPJMD
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	69,16	85,5	80,89	Akan tercapai

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional/Provinsi

**Tabel 3.4**

**Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Standar Nasional/Provinsi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100	100	100



2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,092	1,17	192,13
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	41	n/a	n/a
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	KLA	n/a
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,16	62,41	126,84
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	6,82	7,4	107,83
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	76,18	n/a	n/a
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	n/a	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,54	n/a	n/a
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	n/a	n/a
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	69,16	n/a	n/a

Apabila dibandingkan dengan standar Nasional ada 2 indikator yang sudah sangat baik, sehingga ini perlu dipertahankan untuk pencapaian tahun berikutnya 3 indikator yang sudah melampaui target standar Nasional tetapi tidak serta merta hal ini menyurutkan semangat kinerja untuk capaian kinerja yang lebih baik, karena standar RPJMD kita lebih tinggi dari standar nasional, sehingga perlu terus meningkatkan capaian kinerja tahun



berikutnya. Ada beberapa indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan target nasional, karena tidak ada target dari indikator nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100	100	100	Sudah adanya SATGAS PPA,  Sudah tersedianya Nomor layanan pengaduan P2TP2A,  Sudah adanya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan anak dan Adanya koordinasi antar lembaga layanan	Penindakan tegas terhadap perlakuan KDRT sehingga memberikan efek jera dan Memberikan inisiasi terkait pencegahan terhadap Perempuan dan Anak di 25 Kecamatan
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,265	0,092	165,28	- Pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan - Program keluarga berencana yang semakin di mengerti oleh setiap Pasangan Usia Subur - Pembatasan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penduduk, - KIE yang dilaksanakan secara berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman tentang keluarga berencana, keluarga kecil berkualitas melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43	41	95,35	- Tidak adanya diklat aparatur, - Masih kurangnya pengembangan Inovasi	Usulan diklat aparatur ke BKD dan menciptakan Inovasi di OPD



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	- Sudah adanya SATGAS PPA, Sudah tersedianya Nomor layanan pengadaan P2TP2A, Sudah adanya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan anak dan Adanya koordinasi antar lembaga layanan	- Penindakan tegas terhadap perlakuan KDRT sehingga memberikan efek jera dan Memberikan inisiasi terkait pencegahan terhadap Perempuan dan Anak di 25 Kecamatan
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Madya	100	- Adanya lembaga forum anak, Pengembangan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, desa/kelurahan layak anak, kesehatan ramah anak dan Peningkatan pemenuhan hak anak khususnya di perlindungan anak	- Sosialisasi tentang pengembangan Kabupaten Layak anak, Pembentukan kelembagaan Forum Anak sampai ditingkat terbawah, Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak, Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	78,32	79,16	101,07	-Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah. -Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP





		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,47	6,82	119,48	- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja. -Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	76,18	100,90	Komitmen bersama dalam pencapaian SAKIP lebih baik dan Ketepatan dalam membuat laporan	Pencapaian Indikator yang lebih baik
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	100	Kepatuhan dalam pemilihan agen perubahan	pemilihan agen perubahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	86,54	101,81	Meningkatkan pelayanan Dinas PPKB dan P3A	Forum Konsultasi Publik dalam pelayanan publik
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	2	100	Menciptakan Inovasi pada beberapa kegiatan	Semakin meningkatkan Inovasi Dinas PPKB dan P3A
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70	69,16	98,8	- Tidak adanya diklat aparatur, - Masih kurangnya pengembangan Inovasi	Usulan diklat aparatur ke BKD dan menciptakan Inovasi di OPD

Apabila dilihat dari tabel Analisis Kebersihan/ Kegagalan dalam peningkatan/ penurunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sudah memetakan langkah – langkah solusi yang perlu dilakukan. Solusi tersebut diatas merupakan strategi peningkatan pelayanan Perlindungan Anak serta peningkatan pelayanan Program Bangga Kencana juga peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan.

Sehingga arah kebijakan yang perlu di ambil adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat koordinasi dan komitmen dengan mitra



kerja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sampai pada tingkat lini lapangan, termasuk PPKBD dan Sub PPKBD.

#### 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan 100 (seratus). Secara lengkap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.6**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1,1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100,00	1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	73.594.653	98,13
		1,2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Madya	100,00	2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	48.037.200	96,07
								3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	4.632.900	92,66
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>							<b>100,00</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>130.000.000</b>	<b>126.264.753</b>	<b>97,13</b>	
<b>TINGKAT EFISIENSI 2.87 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 102.96 %</b>												



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	2,1	Rasio Akseptor KB	%	78,32	79,16	101,07	4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	187.988.600	167.917.762	89,32
		2,2	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,47	6,82	119,48	5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.232.701.515	7.099.283.444	98,16
								6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.891.162.724	4.281.286.467	87,53
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>							<b>110,28</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>12.311.852.839</b>	<b>11.548.487.673</b>	<b>93,80</b>	
<b>TINGKAT EFISIENSI 16.48 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 117.56 %</b>												
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	3,1	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	76,18	100,90	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.783.404.679	3.602.895.557	75,32
		3,2	Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	100,00					



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
		3,3	Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	2	100,00				
		3,4	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	Angka	70	69,16	98,80				
		3,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	Angka	85	86,54	101,81				
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR</b>							<b>100,30</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>4.783.404.679</b>	<b>3.602.895.557</b>	<b>75,32</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 24.98 %</b>											
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 133.17 %</b>											
								<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>17.225.257.518</b>	<b>15.277.647.983</b>	<b>88,69</b>

Pada sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, tingkat efisiensi 2,87% dan tingkat efektifitas 102,96%, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berdampak pada efektifitas capaian sasaran. Adapun efisiensi yang dilakukan merupakan bagian dari penekanan penggunaan anggaran yang kurang mendukung capaian sasaran. Pada sasaran terwujudnya pengendalian penduduk tingkat efisiensi 16,48% tingkat efektifitas 117,56%, penyerapan anggaran berpengaruh sangat besar pada capaian sasaran. Sehingga capaian sasaran melebihi dari target



yang ditetapkan, efisiensi anggaran pada sasaran ini pada program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dikarenakan adanya sub kegiatan yang digunakan untuk pendampingan keluarga belum bias dilakukan secara maksimal. Pada sasaran meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik, tingkat efisiensi 16,48% dan tingkat efektifitas 117,56%, tingkat efisiensi ini dikarenakan belanja gaji tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi. Sehingga terlihat efektifitas sangat tinggi.

#### 7. Analisis program/kegiatan/ yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas sebagai berikut

**Tabel 3.7**

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Rasio KDRT	166,66	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	100,00	Menunjang
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	100,00	Menunjang
					<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100,00	Menunjang
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	100,00	Menunjang
					<b>Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak</b>	Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	165,28	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	Total Fertility rate (TFR)	110,50	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	100,00	Menunjang
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peningkatan peserta KB aktif	101,07	Menunjang
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPB	100,00	Menunjang
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	100,11	Menunjang
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan KB di Daerah	100,00	Menunjang
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana	100,00	Menunjang
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	96,24	Menunjang





Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	96,24	Menunjang
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	95,35	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100,00	Menunjang
					Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100,00	Menunjang
					Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100,00	Menunjang
					Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	Menunjang
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	Menunjang
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Rasio KDRT	166,66	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	100,00	Menunjang
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	100,00	Menunjang
					<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100,00	Menunjang
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	100,00	Menunjang
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	100	<b>Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak</b>	Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	101,07	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	Total Fertility rate (TFR)	110,50	Menunjang
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	100,00	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peningkatan peserta KB aktif	101,07	Menunjang
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	100,00	Menunjang
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	100,11	Menunjang
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan KB di Daerah	100,00	Menunjang
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangsa Kencana	100,00	Menunjang
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	119,48	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	96,24	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	96,24	Menunjang
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	100,90	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	100	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100,00	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	101,81	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100,00	Menunjang
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	100	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100,00	Menunjang
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	98,8	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	Menunjang
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	Menunjang

Pada tujuan mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak ada 3 (tiga) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Program yang menunjang kinerja ini rata-rata 100%. Tujuan mewujudkan pengendalian penduduk dan sasaran terwujudnya pengendalian penduduk terdapat 3



(tiga) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, 2 (dua) Program capaiannya diatas 100% dan 1 (satu) program capaiannya kurang dari 100% yaitu program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). Sehingga pada program ini perlu peningkatan kinerja. Tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran Meningkatkan kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik terdapat 1 (satu) program yang menunjang pencapaian kinerja. Rata-rata capaian program penunjang kinerja adalah 100%. Tetapi masih diharapkan untuk dapat meningkatkan capaian guna keberhasilan yang lebih baik.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada perhitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD dan APBDP Kabupaten Wonogiri. Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 berdasar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>75.000.000</b>	<b>73.594.653</b>	<b>98,13</b>
	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000</b>	<b>68.732.053</b>	<b>98,19</b>



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

	Sub Kegiatan Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	68.732.053	98,19
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.862.600</b>	<b>97,25</b>
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.862.600	97,25
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.632.900</b>	<b>92,66</b>
	<b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.632.900</b>	<b>92,66</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	4.632.900	92,66
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>48.037.200</b>	<b>96,07</b>
	<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>48.037.200</b>	<b>96,07</b>
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	50.000.000	48.037.200	96,07
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>4.783.404.679</b>	<b>3.602.895.557</b>	<b>75,32</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.999.900</b>	<b>100,00</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	999.900	99,99
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.650.396.999</b>	<b>2.485.477.894</b>	<b>68,09</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.649.396.999	2.484.477.894	68,08
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>79.967.385</b>	<b>99,96</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.000.000	42.967.385	99,92
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>962.787.680</b>	<b>948.680.533</b>	<b>98,53</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	86.850.400	81.149.253	93,44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	874.937.280	866.531.280	99,04



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.220.000</b>	<b>86.769.845</b>	<b>98,36</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.220.000	50.888.845	97,45
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.500.000	33.499.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	2.382.000	95,28
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>187.988.600</b>	<b>167.917.762</b>	<b>89,32</b>
	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.941.900</b>	<b>99,71</b>
	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	20.000.000	19.941.900	99,71
	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>167.988.600</b>	<b>147.975.862</b>	<b>88,09</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	44.273.600	40.623.800	91,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.175.000	30.299.776	86,14
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	88.540.000	77.052.286	87,03
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( KB )</b>	<b>7.232.701.515</b>	<b>7.099.283.444</b>	<b>98,16</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>2.106.401.400</b>	<b>2.078.507.594</b>	<b>98,68</b>
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.374.000	99,98
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana Prasarana KIE Program KKBPK	47.186.400	46.915.044	99,42
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan	58.040.000	56.909.500	98,05
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	944.400.000	928.100.000	98,27
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.012.500.000	1.003.244.050	99,09
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	39.900.000	38.965.000	97,66
	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.455.800.000</b>	<b>1.455.800.000</b>	<b>100,00</b>
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	1.455.800.000	1.455.800.000	100,00
	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.532.000.115</b>	<b>2.426.475.850</b>	<b>95,83</b>



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.300.000	27.000.000	98,90
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.006.733.500	998.243.600	99,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.434.616.615	1.343.165.850	93,63
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.350.000	13.150.000	75,79
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6.000.000	5.998.000	99,97
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.000.000	9.098.400	90,98
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30.000.000	29.820.000	99,40
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.138.500.000</b>	<b>1.138.500.000</b>	<b>100,00</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.138.500.000	1.138.500.000	100,00
<b>7</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>4.891.162.724</b>	<b>4.281.286.467</b>	<b>87,53</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>4.891.162.724</b>	<b>4.281.286.467</b>	<b>87,53</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	1.201.722.724	1.031.757.548	85,86
	Sub Kegiatan Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	10.000.000	9.993.000	99,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.535.340.000	3.098.932.527	87,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	136.100.000	136.066.892	99,98
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	8.000.000	4.536.500	56,71
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.225.257.518</b>	<b>15.277.647.983</b>	<b>88,69</b>





Realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 capaiannya sebesar 88,69%. Sehingga masih diperlukan upaya peningkatan penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja yang lebih baik. Capaian tersebut dikarenakan pada sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN penyerapannya rendah yaitu 68,09% hal ini adanya pegawai yang pensiun dan mutasi. Pada sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) serapannya 56,71% dikarenakan pada tahun 2022 tidak dilaksanakannya Pemilihan Duta Genre. Untuk itu perlu perhatian khusus pada tahun mendatang guna peningkatan capaian.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai.



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hanya ada 2 Indikator yang belum dapat tercapai, sehingga capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2022 rata-rata 102,30%.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.225.257.518 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.277.647.938 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Sisa Anggaran Rp. 1.947.609.535 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga capaian Realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak 88,69%.



#### 4.2 REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri. Guna perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran guna pencapaian indikator kinerja dengan selaku melakukan koordinasi lintas sektor.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELOMPOK BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI



**MUBAROK, SKM, MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19690212 199003 1 010

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
- 3) Lain-lain yang di anggap perlu



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. TEGUH SETIYONO, M.M  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO  
Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Wonogiri, 07 Januari 2022



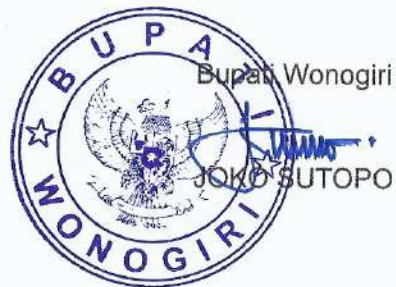
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 %
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	2. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.265 %
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	3. Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	43 Angka
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
		5. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	6. Rasio Akseptor KB	78.32 %
		7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8.47 %
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	8. Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	75.50 Angka
		9. Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		10. Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	0 Angka
		11. Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	70 Angka
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	85 Angka



No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	APBD
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	20.000.000	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.381.215.115	APBD, APBN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.910.637.724	APBD, APBN
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.129.399	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>17.441.982.238</b>	



Wonogiri, 07 Januari 2022  
Plt. Kepala Dinas PPKB dan P3A  
Drs. TEGUH SETIYONO, M.M







## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUBAROK, SKM, MM  
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO  
Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

SKPD

**: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN ANGGARAN

**: 2022**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 %
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	2.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.265 %
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	3.	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	43 Angka
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	4.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
		5.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
5	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	6.	Rasio Akseptor KB	78.32 %
		7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8.47 %
6	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	8.	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	75.50 Angka
		9.	Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		10.	Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	0 Angka
		11.	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	70 Angka
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	85 Angka

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	APBD
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	20.000.000	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.381.215.115	APBD, APBN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.910.637.724	APBD, APBN
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.129.399	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>17.441.982.238</b>	







## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUBAROK, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO

Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 2 November 2022

Pihak Kedua,  
  
JOKO SUTOPO

Pihak Pertama,  
  
MUBAROK, SKM, MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 %
1.1	Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
2.	Tujuan Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.265 %
2.1	Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	78.32 %
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8.47 %
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	43 Angka
3.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	75.50 Angka
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	0 Angka
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	70 Angka
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	85 Angka



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 75.000.000	APBD
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 50.000.000	APBD
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 5.000.000	APBD
4. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 187.988.600	APBD, APBN
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 7.232.701.515	APBD, APBN
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 4.891.162.724	APBD, APBN
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.783.404.679	APBD
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 17.225.257.518</b>	

Wonogiri, 2 November 2022



**Revisi Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2022) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100
		2. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya
		3. Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	%	100
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	4. Rasio Akseptor KB	%	78.32
		5. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8.47
		6. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.265
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	7. Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75.50
		8. Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1
		9. Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	0
		10. Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	Angka	70
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	Angka	85

